

**KONFLIK PEMBANGUNAN STASIUN KERETA API GARUT
ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT
DAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyusun Skripsi pada Jurusan Ilmu
Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi*



Oleh,

WAHYU WIBOWO SUHARTONO

NPM. 153507002

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SILIWANGI

TASIKMALAYA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

KONFLIK PEMBANGUNAN STASIUN KERETA API GARUT

ANTARA PEMERINTAH DAERAH GARUT DAN

MASYARAKAT

Oleh,

WAHYU WIBOWO SUHARTONO
NPM. 153507002

Disetujui dan disahkan
Tanggal

Tim Penguji

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Pembimbing 1
Fitriyani Yuliawati S.I.P., M.Si.
NIDN. 0010098702 | :
..... |
| 2 | Pembimbing 2
Randi Muchariman S.IP., M.A.
NIDN. 0010098702 | :
..... |
| 3 | Penguji (Outsider)
Nisa Khoerunisa S.IP., M.I.Pol | :
..... |
| 4 | Penguji (Outsider)
Faisal Fadilla Noorikhsan A.H
S.Sos., M.Si
NIDN. 0412049101 | :
..... |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. H. Iis Marwan, S.H., M.Pd
NIP. 196408181990021001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Wibowo Suhartono
Nomor Pokok Mahasiswa : 153507002
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Siliwangi

Menyatakan bahwa :

- Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Siliwangi maupun di perguruan tinggi lain.
- Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Pembimbing.
- Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak/benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Siliwangi.

Tasikmalaya, 02/Januari/2023
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 10.000

Wahyu Wibowo Suhartono,
NPM. 153507002

ABSTRAK

Masalah sengketa lahan memang sudah sering muncul di Indonesia. Contohnya masalah sengketa lahan yang terjadi di Kabupaten Garut yaitu konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerahnya. Konflik ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak yang mengakibatkan timbulnya konflik antara masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu juga ada beberapa faktor lainnya yang membuat konflik ini semakin berakut-rakut dan semakin mendalam hingga menimbulkan korban baik itu secara psikis, materi dan juga hinnga pada korban jiwa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi hingga terjadinya konflik pembangunan stasiun kereta api garut antara pemda Garut dan warga setempat. Yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah adanya perebutan penggunaan lahan antara pemerintah daerah kabupaten Garut dan warga setempat yang terkena dampak dari pembangunan ini.

Penelitian ini menggunakan teori konflik mengenai faktor-faktor terjadinya konflik dengan metode deskriptif-kualitatif, Teknik ini berupaya untuk menetapkan informan dalam penelitian menggunakan *purposive sampling*, dan juga teknik analisis data yang dimulai dari tahapan observasi dilapangan dan dilanjutkan mengikuti aktivitas bersama objek penelitian, melakukan wawancara untuk mencapai data yang dibutuhkan, konfirmasi data untuk verifikasi, dan juga melakukan analisis data sesuai dengan kontruksi pembahasan hasil penelitian. Validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik pengumpulan data, dengan menggunakan teori konflik mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik.

Penelitian ini menemukan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Pemda Garut dan Warga setempat. Seperti, pembongkaran pemukiman warga tidak mempertimbangkan opini / suara masyarakat setempat terlebih dahulu, Perbedaan kepentingan penggunaan lahan antara masyarakat dan

pemerintah daerah, dll. Selain itu, penelitian ini juga telah mengetahui bagaimana upaya untuk menyelesaikan konflik antara Pemda Garut dan warga setempat dengan beberapa cara yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak, agar supaya konflik ini tidak semakin mendalam dan mengakar sehingga dapat meminimalisir korban yang akan semakin meluas. Yaitu salah satunya yaitu dengan cara membuka dialog antara pemerintah daerah dengan warga setempat. Pemberian Ganti Rugi Kepada Warga yang Terkena Dampak.

Kata Kunci:Konflik, Pembangunan, Pemerintah Daerah, Warga/Masyarakat.

ABSTRACT

Land disputes have often arisen in Indonesia. For example, the problem of land disputes that occur in Garut Regency is the conflict over land disputes between the community and the local government. This conflict is caused by differences in interests between the two parties which result in conflicts between the community and the local government. Apart from that, there are also several other factors that make this conflict more and more protracted and deeper, causing casualties both psychologically, materially and also to fatalities.

This study aims to determine what causes the conflict in the construction of the arrowroot train station between the local government of Garut and local resident. The background of this determination is the struggle for land use between the local government of the Garut district and local resident who are affected by this development.

This research uses theory of Ibnu Khaldun about factors causes of conflict with descriptive-qualitative method, Technique seeks to establish informants in research using purposive sampling, and also data analysis techniques that start from the observation stage in the field and continue to follow activities with the research object, conduct interviews to achieve the data needed, confirm data for verification, and also conduct data analysis in accordance with the construction of the discussion of research result. Data validation used in this study was triangulation of data collection techniques, By using the theory of thought from Ibnu Khaldun regarding the factors that cause conflict.

This study finds out what are the factors that cause conflict between the Garut local government and local residents. For example, demolition of residents' settlements does not take into account the opinion / voice of the local community first, Differences in land use interests between the community and local government, etc. In addition, this research has also found out how the efforts to

resolve conflicts between the Garut Regional Government and local residents in several ways that can be taken by both parties, so that this conflict does not deepen and take root so as to minimize the number of victims that will spread. One of them is by opening a dialogue between the local government and local residents. Provision of Compensation to Affected Residents.

Keyword: *Conflict, Delelopment, Regional Government, The Citizens,*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang atas berkah dan rahmat-nya yang senan tiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan proposal yang berjudul **“Konflik Pembangunan Stasiun Kereta Api Garut antara Pemda Garut dan Warga Setempat”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi.

Dalam penulisan proposal penelitian ini tentunya penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Terima kasih yang setulus-tulusnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada;

1. Kedua orang tua, ayahanda Suhartono,S.sos.,SH. dan ibunda tercinta Riris Puji Rahayu,S.Pd. yang senantiasa memberi kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
2. Kepada kakak Riska Agustina Suhartini, S.Kep., Ners. dan adik Siti Pujiastuti Suhartini yang telah memberikan dorongan semangat.
3. Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Wakil Dekan, dan Ketua maupun Sekretaris Jurusan beserta jajarannya.
4. Kepada bapa Akhmad Satori,S.IP.,M.Si.selaku pembimbing I yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi ini.
5. Kepada ibuFitriyani Yuliawati,S.IP.,M.Si. selaku pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen FISIP Universitas Siliwangi yang memberikan penulis banyak sekali pengetahuan selama duduk dibangku kuliah.
7. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2015 FISIP UNSIL, yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Semua pihak yang telah ikut serta membantu penulis yang tidak dapat disebutkan namanya secara satu per satu.

Penulis menyadari kekurangan yang ada dalam proposal penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan proposal penelitian yang akan mendatang.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Aamiin.

Tasikmalaya,

Penyusun

DAFTAR ISI

No table of contents entries found.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka	13
2.1.1 Konflik	13

2.1.2 Warga/Masyarakat	20
2.1.3 Pemerintah Daerah	22
2.1.4 Pembangunan.....	24
2.2 Landasan Teori.....	26
2.3 Penelitian Terdahulu.....	29
2.4 Kerangka Pemikiran	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian.....	35
3.2 Metode Analisis Data	41

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian	47
4.2 Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Konflik antara Pemda Garut dan Warga setempat	53
4.3 Upaya untuk Menyelesaikan Konflik antara Pemda Garut dan Warga Setempat	58
4.4 Pokok Temuan Penelitian	59

BAB V PENUTUP

Kesimpulan	63
Saran	65
 Daftar Pustaka	 68
Lampiran – Lampiran	69

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 50
2. Komposisi Penduduk Desa Pakuwon Berdasarkan Mata Pencarian ... 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Kerangka Berpikir	34
2. Model Analisis Data Interaktif	44
3. Peta Kecamatan Garut Kota	48
4. Peta Desa Pakuwon	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang mempunyai beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan juga laut, ini merupakan kondisi lingkungan geografis yang menjadi sumber dasar adanya keanekaragaman ras, suku, budaya, dan juga golongan di Indonesia. Setiap pulau mempunyai suku dan budaya yang berbeda-beda, dengan kepemilikan wilayahnya tersendiri. Dengan kemajemukan tersebut tidak dipungkiri bahwa penggunaan akan lahan/tanah kewilayahan sangat banyak sekali dibutuhkan. Tanah yang merupakan sebuah karunia dari Tuhan yang Maha Esa merupakan sumber kesejahteraan, kehidupan, dan kemakmuran bagi setiap individu, oleh karena itu satu-satunya kebutuhan manusia untuk tinggal. Tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengsebuah bangsa Indonesia yang dimana penggunaanya sangat dibutuhkan.

Tanah/lahan bagi setiap kehidupan manusia, mengandung makna yang multidimensional. Pertama, secara ekonomi, tanah itu merupakan sarana untuk produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan pada pemiliknya. Kedua, secara politis, tanah/lahan juga juga dapat menentukan posisi atau kedudukan seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya, dapat memnentukan tinggi rendahnya status sosial si pemiliknya.

Keempat, tanah bermakna sangat sakral, yang artinya pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.

Peranan lahan/tanah dalam sebuah kehidupan manusia merupakan induk dari segala pokok kebutuhan selain dari kebutuhan pangan maupun sandang. Tanah dapat dinilai sebagai harta permanen, karena itu sebagai harta yang dinilai sangat bernilai ekonomis berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Bukan sekedar bernilai ekonomis tinggi akan tetapi juga memiliki nilai-nilai lainnya yang dapat bisa menopang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebutuhan itu penting akan tanah bukan menjadi seseorang dapat dengan mudah memiliki dan juga menguasai tanah atau lahan. Penyebab inilah yang membuat sering kali lahan atau tanah membuat setiap individu atau kelompok berkonflik.

Konflik di era saat ini telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia, yang mendorong terjadinya dinamika sosial baik itu dari segi politik maupun budaya. Konflik pun bisa terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja, baik bersifat vertikal maupun horizontal. Jenis konflik itu sendiri mempunyai banyak sekali jenisnya contohnya saja, konflik antar partai politik, konflik antar mahasiswa, konflik pendukung sepak bola, konflik perebutan lahan, ataupun konflik antar institusi negara. Akibat dari konflik seperti ini maka banyak sekali dampak yang akan di dapat oleh para masa kerusuhan seperti dampak secara sosial, prikis, maupun secara fisik. Dalam upaya penyelesaian konflik ini maka diperlukan manajemen konflik untuk melihat persoalan dan penyelesaiannya.

Bangsa Indonesia yang merupakan sebuah negara agraris membuat konflik perebutan lahan menjadi tidak asing lagi, tidak jarang kita melihat saat sekarang ini pemberitaan di media sosial ataupun media cetak sangat dipenuhi dengan pemberitaan perebutan lahan. perebutan lahan yang terjadi di Indonesia itu sendiri sangat mempunyai banyak faktor penyebabnya dengan berbagai golongan yang terlibat. Baik itu secara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok lain. Biasanya konflik iitu sering timbul karena merasa tanah itu sudah menjadi hak mereka masing-masing. Selain itu juga tanah saat ini merupakan hal yang sangat berharga bagi setiap individu manusia karena tanah atau lahan sudah menjadi bagian dari manusia baik itu untuk tempat tinggalnya, tempat mencari uang, tempat untuk menunjukkan status sosialnya dimasyarakat dan masih banyak hal yang sangat bernilai lainnya.

Sengketa agraria ini bahkan sering kali membuat konflik yang berkepanjangan dan juga memunculkan adanya kontak fisik antara pelaku dan hingga pada akhirnya menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Seperti contohnya yang terjadi di Garut akhir-akhir ini dimana adanya konflik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut (PemDa Garut) dan juga warga setempat dalam hal perebutan lahan dalam pembangunan stasiun Kereta Api. Konflik yang timbul diakibatkan tuntutan warga yang ingin lahan pemukimannya tidak di gusur dan di alih fungsikan pada pembangunan stasiun dan rel kereta api.

Sengketa lahan yang terjadi di Garut inipun bukan hal pertama kali yang terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa kasus konflik perebutan lahan yang terjadi di Indonesia misalnya kasus konflik yang terjadi di Kulon Progo soal pembangunan proyek bandara di kecamatan tersebut, konflik di pesisir pantai marosi, Sumba Barat, NTT yang menimbulkan korban nyawa. Selanjutnya, konflik yang pernah terjadi di Rumpin pada tahun 2007 kasus yang terdapat kasus sengketa lahan antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan juga warga setempat Desa Alastlogo Pasuruan, Tanak Awu, di Cisompet. Dan pada akhir-akhir ini juga terdapat konflik yang terjadi antara warga masyarakat dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga yang terjadi di daerah desa Setrojenar Kabupaten Kebumen. Secara singkatnya munculnya konflik ini terjadi adalah setelah 29 tahun lamanya tanah itu menjadi tempat latihan tentara. Akan tetapi perseteruan atas lahan tersebut kembali muncul pada tahun 2007. Warga mencari keadilan dengan berbagai cara dan upaya, seperti melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Bupati Kebumen, dan sampai kepada Komnas Ham (Hak Asasi Manusia) sekalipun. Akan tetapi, konflik ini tetap saja berlanjut sampai tidak menemui titik terang yang jelas dan menggantung begitu saja.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) setidaknya pada tahun 2018 telah mencatat terjadi 410 konflik agraria.¹ Lahan yang diperebutkan antara Pemda Garut dan warga setempat ini terletak di Pakuwon, Garut Kota, Garut. Stasiun yang berada pada ketinggian +717 meter. Stasiun ini dibangun bersamaan dengan pembangunan lintas Cibu-

Garut. Karena pusat kota Kabupaten Garut agak jauh dari stasiun utama di kabupaten ini, maka perlu dibuat lintas cabang. Sehingga, dibangunlah jalur kereta api dari Stasiun Cibatuman menuju Stasiun Garut. Jalur ini dibuka bersamaan dengan jalur dari Cicalengka pada tanggal 14 Agustus 1889. Selama ini lahan stasiun ini pernah digunakan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk dijadikan kantor sekretariat, seiring berjalannya waktu fungsinya pun berubah menjadi pasar dan tempat tinggal warga.

¹diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2019/01/03/selama-2018-konflik-agraria-paling-banyak-di-sektor-perkebunan> "Konflik Agraria Paling Banyak Di Sektor Perkebunan", pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 10:30

Kebijakan pemerintah melalui PT.KAI (Kereta Api Indonesia) berakibat pada masyarakat secara langsung, sebanyak 1.077 bangunan permanen dan semi permanen jalur kereta api Cibatuman-Garut dibongkar.² selain itu masyarakat sekitar garut pun terjangkit gatal-gatal yang diakibatkan aktivitas penggusuran yang dilakukan oleh pihak pemda, dalam upaya-nya untuk membangun stasiun dan jalur kereta api ini.

Masyarakat garut dalam menyikapi kebijakan ini sangat beragam, ada yang menerima dan mendukung dengan alasan akan berdampak pada perekonomian masyarakat garut. Akan tetapi tidak sedikit yang menolaknya. Penolakan itu berasal dari khususnya warga yang terkena dampak secara langsung. Masyarakat garut saat ini mendesak kebijaksanaan dari pemerintah daerah kabupaten Garut untuk memperhatikan nasib mereka. kebijakan

berbeda dengan kebijaksanaan karena kebijakan adalah perintah atasan, sedangkan kebijaksanaan merupakan perubahan peraturan yang sudah ditetapkan oleh atasan sesuai keadaan situasi dan kondisi³

²diakses dari <https://bandung.kompas.com/read/2018/12/13/16531041/fakta-di-balik-reaktivasi-jalur-ka-cibatu-garut-ancam-jalan-kampung-hingga?page=all>“Fakta Dibalik Reaktivasi Jalur Ka Cibatu Garut Ancam Jalan Kampung”, pada tanggal 20 Agustus 2019 pukul 08:00 wib.

³prof. DR .H. Inu Kencana Syafiie, M.Si, Ilmu Pemerintahan. Mandar Maju, Bandung, 2013, hal.168

“Secara pribadi dan semua warga merasa kecewa. mengapa harus sekarang, bukan dari sebelum-sebelumnya sudah dijadikan. Sekarang keluarga sudah betah, yang susah beradaptasi lagi dengan warga lain, kecewa dari situ”. Ujar Gani salah satu warga yang terkena dampak penggusuran.

Selain itu, tuntutan masyarakat yang diajukan terhadap Pemda Garut dirasa tidak di respon dengan baik. Inilah yang menyebabkan terjadinya konflik antara Pemda Garut dan warga setempat, yang telah menempati lahan tersebut setelah sekian puluhan tahun. Secara hukum lahan yang diperebutkan ini adalah milik PT.KAI yang digunakan masyarakat untuk pemukiman, dengan membayar sewa terhadap PT.KAI.

Akan tetapi konflik ini bermula dari pembangunan yang dirasa terlalu cepat bagi warga yang bingung harus pindah kemana, yang rata-rata perekonomian warga ditempat tersebut masih rendah. Dan juga respon Pemda

yang seakan-akan tidak peduli terhadap warganya yang terkena dampak pembangunan stasiun ini membuat emosi masyarakat setempat semakin menjadi-jadi kepada pemerintah.

Berdasarkan dengan uraian singkat diatas mengenai latar belakang konflik perebutan lahan antara Pemerintah Kabupaten Garut dan Warga setempat, maka dipandang perlu untuk dikaji lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi konflik ini bisa terjadi. selain itu, penulis juga tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana upaya penyelesaian yang terjadi akibat adanya konflik ini serta dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini, maka dari itu penulis menulis penelitian ini sebagai syarat Skripsi dengan judul:

**“KONFLIK PEMBANGUNAN STASIUN KERETA API GARUT
ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DAN
MASYARAKAT”.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dan juga warga sama-sama mempunyai kepentingan dengan lahan tersebut. Pemerintah menginginkan lahan tersebut dijadikan stasiun kereta api dengan tujuan membangkitkan ekonomi daerah. Sedangkan masyarakat yang sudah puluhan tahun menduduki

lahan tersebut menginginkan lahan tersebut tetap menjadi pemukiman untuk mereka.

2. Cara pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dirasa tidak didasarkan kepada kepentingan masyarakat.
3. Dampak dari pembangunan stasiun ini sangat luas dan dirasakan oleh hampir semua masyarakat desa Pakuwon.

1.3 Pembatasan Masalah

Supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitin ini akan lebih memfokuskan kepada aspek tentang konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan pemerintah daerah kabupaten garut (studi kasus di Desa Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut)

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai faktor utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Pemda Garut dan Warga setempat?
2. Bagaimana upaya untuk menyelesaikan konflik antara Pemda Garut dan Warga setempat?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai/dituju oleh peneliti daalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengenai apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Pemda Garut dan Warga setempat.
2. Menjelaskan bagaimana upaya untuk menyelesaikan konflik antara Pemda Garut dan Warga setempat.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang positif bagi semua pihak dan perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan konflik perebutan lahan. adapun manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Universitas Siliwangi

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini akan bertambahnya koleksi bacaan sehingga dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai konflik perebutan lahan.

- b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini menjadi referensi dan tambahan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa untuk menambah

wawasan, pengetahuan dan juga pemahaman tentang konflik perebutan lahan.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman nyata bagi peneliti sehingga yang nantinya dapat memberikan kontribusinya dalam penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan tambahan terhadap masyarakat pada umumnya agar selalu peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya sehingga dapat diambil solusi yang terbaik dan juga memberikan kontribusi bagi menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya.

2. Manfaat Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai referrensi tambahan bagi penelitian selanjutnya, menambah pengetahuan bacaan mengenai konflik perebutan lahan dan juga selanjutnya menjadi bahan acuan khususnya bagi penelitian yang sejenis dimasa berikutnya.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan juga memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan pendidikan dan juga dapat meningkatkan perkembangan ilmu

pengetahuan terutama ilmu politik, pada kehidupan sosial khususnya mengenai pengetahuan pengembangan studi ilmu politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konflik

a. Definisi Konflik

Menurut Soejono Soekarno konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan (2006). Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham (Pruitt dan Rubin, 2009). Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Yang disusun oleh Poerwadarminta, konflik mempunyai arti yaitu pertentangan atau percekocan. Pertentangan ini sendiri muncul kedalam sebuah bentuk pertentangan ide ataupun fisik antara kedua belah pihak yang sedang bersebrangan.

⁴Hakimul Ikhwan Affandi, Akar Konflik Sepanjang Zaman Elaborasi pemikiran Ibn Khaldun. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 73.

Selain itu menurut Webster istilah *conflict* dalam bahasa latinnya berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak (Pruit dan Rubin, 2009).

Konflik biasanya berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling betentangan atau berlawanan. Dalam sebuah bentuk ekstrimnya, konflik dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan juga eksistensi. Konflik juga bertujuan sampai pada tahap pembunuhan eksistensi orang ataupun kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau musuh ataupun saingannya. Konflik mengenai perebutan lahan ini jika dilihat dari segi positifnya yaitu konflik dapat menjadi sebuah awal dari terjadinya perubahan. Biasanya konflik ini terjadi akibat adanya pertentangan antara kelompok satu dengan yang lainnya akibat adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Karena ada salah satu yang rugi dan yang untung maka terjadilah konflik baik itu menjadi sebuah konflik berukuran skala kecil, sedang ataupun bahkan besar yang sampai bisa merenggut korban baik secara materi, mental, dan yang paling fatal adalah menelan korban jiwa.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, tujuan atau nilai yang ingin diraih yang menyebabkan suatu kondisi dimana tidak nyaman baik didalam diri individu maupun antar kelompok. Pada konflik perebutan lahan ini terjadi konflik antar

kelompok dengan kelompok lain yaitu pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Menurut Taman Dan Burgess, keduanya memandang konflik sebagai bentuk yang berbeda dari kompetisi ataupun persaingan. Mereka menulis, keduanya merupakan bentuk interaksi, kompetisi, atau persaingan adalah perjuangan antara individu atau kelompok individu yang dilakukan tanpa melalui kontak dan komunikasi. Di lain pihak konflik ialah sebuah perlombaan dimana terjadi kontak sebagai kondisi yang sangat diperlukan.

b. Jenis Jenis Konflik

Konflik yang timbul dalam masyarakat mempunyai banyak sekali bentuknya, ragamnya, dan juga jenis nya. Soetopo (1999) mengklasifikasikan jenis jenis konflik dipandang dari segi materinya menjadi empat, yaitu :

1. Konflik tujuan

Konflik tujuan yaitu konflik terjadi jika ada dua tujuan atau yang kompetitif bahkan yang kontradiktif.

2. Konflik peranan

Konflik peranan yaitu konflik yang timbul karena manusia memiliki lebih dari satu peranan dan tiap peranan tidak selalu memiliki kepentingan yang sama.

3. Konflik nilai

yang dimiliki setiap individu dalam organisasi tidak sama, sehingga konflik dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan organisasi.

4. Konflik kebijakan

Konflik kebijakan yaitu suatu konflik dapat terjadi karena ada ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap perbedaan kebijakan yang ditemukan oleh satu pihak oleh kebijakannya.

c. Akibat Terjadinya Konflik

Konflik yang berkepanjangan akan menimbulkan dampak kepada suatu masyarakat, baik itu dampak secara positif ataupun negatif. Adapun beberapa contoh dampak *social conflict* adalah sebagai berikut ini:

1. Dampak Negatif

- Terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpecahan dan permusuhan antar kelompok masyarakat.
- Timbulnya pandangan negatif terhadap kelompok yang berbeda sehingga sikap dan tindakan terhadap kelompok tersebut menjadi buruk.
- Timbulnya sikap dan tindakan yang diskriminatif terhadap kelompok masyarakat yang berbeda karena alasan tertentu.

2. Dampak Positif

- Solidaritas setiap kelompok masyarakat menjadi lebih besar ketika terjadi perselisihan dengan pihak asing.
- Munculnya berbagai forum yang mendiskusikan aspek kehidupan yang baru.
- Konflik sosial dapat menghasilkan jalan tengah dan win-win solution bagi pihak pihak yang berseteru.

d. Faktor Penyebab Konflik

Faktor penyebab atau akar-akar pertentangan konflik dibagi menjadi beberapa, diantaranya;

1) Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu ataupun kelompok menjadi sumber lain dari pertentangan baik itu secara kepentingan ekonomi, politik, ataupun sebagainya.

2) Perbedaan antara individu-individu

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara satu sama lainnya, terutama perbedaan pendirian dan perasaan diantara mereka.

3) Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan sangat cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam sebuah masyarakat yang

akan menyebabkan munculnya golongan-golongan yang akan berbeda-beda pendiriannya.

4) Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan yang bergantung pula pada pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.

e. Cara Penyelesaian Konflik

Beberapa cara dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik (Soerjono Soekanto, 1990:77-78), yaitu:

1. *Compromise*

Suatu cara yang dimana pihak-pihak yang terlibat konflik saling mengurangi tuntutan, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada

2. *Mediation* (Penengahan)

Menggunakan mediator yang diundang untuk bisa menengahi konflik. Mediator juga dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu.

3. *Conciliation*

Langkah ini merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berselisih demi tercapainya atau terwujudnya suatu persetujuan bersama

4. *Coercion* (Paksaan)

Coercion merupakan sebuah usaha penyelesaian dengan cara memaksa dan menekan pihak lain supaya menyerah, paksaan merupakan suatu cara dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah apabila dibandingkan dengan pihak lawan. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan juga menyerah secara terpaksa.

5. *Arbitration*

Langkah yang terakhir ini merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Pihak ketiga mendengarkan keluhan atau pendapat kedua belah pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan yang mengikat.

Konsep sentral dari teori konflik ini adalah wewenang dan juga posisi yang keduanya miliki merupakan fakta sosial. Distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi salah satu faktor yang menentukan konflik lahan secara sistematis, karena didalam masyarakat selalu terdapat golongan-golongan yang saling bertentangan yaitu penguasa dan yang dikuasai.

Teori konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat merupakan pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas posisinya dan juga menekan peran kekuasaan dalam mempertahankan keterlibatan dalam sebuah masyarakat.

2.1.2 Warga / Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris mempunyai arti yaitu *Society*, yang berarti kawan. Sedangkan masyarakat sendiri berasal dari kata bahasa Arab yaitu *syakara* yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Apabila disimpulkan secara utuh maka masyarakat mempunyai arti sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi satu sama lainnya.

Menurut pendapat dari Koerniatmanto S, warga negara ialah anggota negara yang memiliki status khusus mengenai negaranya, memiliki interaksi hak dan kewajiban yang berbentuk timbal-balik mengenai negaranya. Adapun definisi warga / masyarakat menurut beberapa ahli yaitu:

- a. Menurut pendapat dari Graham Murdock, warga negara ialah suatu hak untuk bisa berperan serta secara kongkret dalam beragam bentuk struktur sosial, politik dan kehidupan kultural serta untuk bisa menolong membentuk bagian-bagian yang seterusnya dengan begitu maka memperbesar gagasan-gagasan.
- b. Menurut pendapat dari Ko Swaw Sik, warga negara ialah hubungan hukum antara Negara dan seseorang. Dan hubungan tersebut berupa suatu “ikatan politis” antara Negara yang memperoleh status sebagai Negara yang independen & diakui karena mempunyai tata Negara.
- c. Menurut Abdul Syani, warga / masyarakat berasal dari kata *musyarak* (Arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah

menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.⁵

- d. Menurut Abu Ahmadi warga / masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat, yang ditaati dalam lingkungannya.⁶

⁵Diakses dari <https://pakdosen.co.id/pengertian-warga-negara/> "Pengertian Warga Negara" pada tanggal 12 November 2019 pukul 15.20

⁶Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal.97

- e. Menurut Supriyo Priyanto warga negara berarti anggota keluarga negara. Mereka adalah rakyat yang menetap disuatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara.⁷

Berdasarkan pada pengertian tentang masyarakat / warga dari beberapa tokoh diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama-sama dalam kurun waktu lama dan menempati suatu wilayah tertentu dalam membentuk suatu sistem sosial yang menghasilkan kebudayaan.

2.1.3 Pemerintah Daerah

a. Definisi

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷Priyanto, Supriyo, Pendidikan Kewarganegaraan, Fasindo, Semarang, 2009, hal.173

Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.⁸

Penyelenggara pemerintah daerah yang dimaksud diatas adalah seperti Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan perangkat lainnya (kepala dinas, kepala badan, dan unit-unit kerja lain yang diatur oleh Sekretaris Daerah). Sedangkan lembaga legislatif yang berada di daerah adalah DPRD 1 untuk tingkat provinsi, dan DPRD 2 untuk tingkat kabupaten atau kota.

b. Fungsi

Fungsi dari pemerintah daerah ini dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan dan mengatur jalannya pemerintahan, adapun fungsinya yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004.

⁸Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia "Pemerintahan Daerah di Indonesia", pada tanggal 12 November 2019 pukul 19.59

Pertama, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Kedua, menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

c. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang dari pemerintah daerah ini telah tertulis pada Undang-Undang nomor 32 Pasal 25 tahun 2004. Tugas dan wewenang pemerintah daerah meliputi mengajukan rencana Perda, Menerapkan Perda yang telah disepakati bersama DPRD, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, Memimpin dan Mewakili daerahnya didalam ataupun diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama DPRD.

Itulah beberapa tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam undang-undang dan wajib dijalankan oleh semua pemerintah daerah.

2.1.4 Pembangunan

Pembangunan sering kali dikaitkan dengan ekonomi, politik, mental dan berbagai bidang lainnya. Selain itu, pembangunan juga sering dikaitkan dengan perubahan ke arah yang lebih baik atau perubahan dari

hal lama ke hal baru. Jadi, secara singkat pengertian pembangunan adalah setiap kegiatan terencana guna mencapai perubahan ke arah yang lebih baik.

Dalam kamus bahasa Indonesia pembangunan mempunyai arti proses, cara, perbuatan membangun. Selain itu terdapat pembangunan menurut beberapa tokoh seperti berikut:

a. Menurut Katz

Mengatakan pembangunan yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai “pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan ialah pembinaan bangsa “national building” atau perkembangan sosial ekonomi. Maka untuk mencapai pembangunan yang telah dicangkan selama ini bahwa dapat berjalan sesuai harapan bersama bahwa kepentingan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahannya proses-proses pelaksanaan pembangunan.

b. Menurut Ginanjar Kartasasmita “1994”

Memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

c. Menurut Effendi “2002:2”

Menurutnya pembangunan ialah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.

⁹Diakses dari <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/> “Pengertian Pembangunan Para Ahli”, pada tanggal 12 November pukul 21.03

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah seperangkat konsep, definisi, proposisi yang telah disusun dengan sangat rapih, dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini pula akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Oleh sebab itu, pembuatan landasan teori secara baik dan juga benar dalam sebuah penelitian menjadi salah satu hal yang penting, karena landasan teori akan menjadi sebuah pondasi dan landasan untuk penelitian.

Untuk membantu penulis agar lebih memudahkan dalam menganalisis data, serta untuk mendapatkan jawaban permasalahan dalam penelitian ini, maka sangat dibutuhkan sebuah landasan teori sebagai kerangka intelektual. Berdasarkan asumsi tersebut teori yang relevan dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan teori manajemen konflik sebagai pondasi dan patokan dalam sebuah penelitian. Titik fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik bisa terjadi dan juga bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Teori tersebut melihat bahwa konflik yang terjadi tidak bisa berdiri sendiri.

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen konflik, menurut Minnery manajemen konflik adalah suatu proses, sama halnya dengan perencanaan merupakan proses. Beliau juga berpendapat bahwa proses manajemen konflik perencanaan sebagai bagian yang rasional dan bersifat iteratif, berarti pendekatan model manajemen konflik perencanaan secara terus menerus atau continue akan mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang ideal dan representatif. Dengan demikian tahapan manajemen konflik perencanaan juga meliputi beberapa langkah yaitu; penerimaan terhadap keberadaan konflik (dihindari, ditekan, atau didiamkan), klasifikasi karakteristik dan struktur konflik, evaluasi konflik (jika bermanfaat maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya), menentukan aksi yang dipersyaratkan untuk mengelola konflik, serta menentukan peran perencanaan sebagai partisipan atau pihak

ketiga dalam mengelola konflik. Maka keseluruhan proses yang berlangsung dalam tahap perencanaan ini yang melibatkan perencanaan atau planner sebagai aktor untuk mengelola konflik baik sebagai partisipan atau juga menjadi pihak ketiga.

Sedangkan menurut Dawn M. Baskerville, dia menganggap bahwa ada setidaknya 6 tipe manajemen konflik yaitu: avoiding, accommodating, compromising, competing, collaborating, dan conglomeration. Avoiding adalah individu ataupun organisasi pada umumnya cenderung menghindari konflik. Berbagai hal sensitif dan berpotensi menyebabkan konflik sebisa mungkin dihindari. Ini adalah cara yang paling efektif untuk menjaga lingkungan terhindar dari konflik. Accommodating merupakan cara mengumpulkan berbagai pendapat dari banyak pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan mengumpulkan berbagai macam pendapat, maka organisasi dapat mencari jalan keluar. Lalu, compromising cenderung memperhatikan pendapat dan kepentingan semua pihak. Competing adalah cara menyelesaikan konflik dengan mengarahkan pihak yang berkonflik untuk saling bersaing dan memenangkan kepentingannya masing-masing. Selanjutnya, collaborating merupakan metode menyelesaikan konflik dengan bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan karena semua pihak bersinergi dalam menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat konflik. Dan yang terakhir adalah conglomeration yang merupakan penyelesaian konflik dengan mengkombinasikan kelima tipe manajemen

konflik diatas. Tipe ini membutuhkan tenaga, pikiran dan juga waktu yang besar dalam proses penyelesaian konfliknya.

Selain itu ada 5 tahap untuk bisa memahami manajemen konflik dengan baik menurut Stevenin. Dengan memahami 5 tahapan ini maka organisasi dapat lebih mudah dalam merumuskan strategi terbaik dalam penanganan konflik. 5 tahap itu adalah pengenalan, diagnosis, menyepakati solusi, pelaksanaan, dan evaluasi.

Sedangkan untuk teknik penyelesaian konflik itu sendiri setidaknya mempunyai 6 cara yang dapat ditempuh, yaitu; yang pertama, persuasi merupakan usaha mengubah posisi pihak lain dengan menunjukkan kerugian yang mungkin timbul. Kedua, rujuk merupakan suatu usaha pendekatan dan hasrat untuk kerja sama dan menjalani hubungan yang lebih baik, demi kepentingan bersama. Ketiga, penarikan diri suatu penyelesaian masalah dengan meminta salah satu atau kedua pihak menarik diri dari hubungan. Keempat, pemecahan masalah terpadu yaitu usaha menyelesaikan masalah dengan memadukan kebutuhan kedua belah pihak. Kelima, tawar-menawar merupakan suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak dengan saling mempertukarkan konsesi yang dapat diterima. Keenam, adalah pemaksaan atau penekanan yang merupakan cara memaksa atau menekan pihak lain agar menyerah. Dan yang terakhir adalah intervensi pihak ketiga, apabila pihak yang bersengketa tidak bersedia berunding atau usaha kedua pihak menemui jalan buntu, maka pihak ketiga dapat dilibatkan dalam penyelesaian.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak dapat menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Tetapi penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut ini merupakan salah satu penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sahlan dengan judul penelitian “Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Pada Eksplorasi Tambang di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu penilaian yang dilakukan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran, dan mencari kembali suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya konflik di kecamatan lambu kabupaten Bima, dan apa saja faktor yang menyebabkan meluasnya eskalasi konflik di kecamatan lambu kabupaten Bima serta apa saja resolusi konflik kasus ijin pertambangan yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat.

Konflik yang terjadi di kecamatan Lambu kabupaten Bima ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkannya; kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dirasa kurang tepat dengan nilai-nilai yang termuat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Selain itu, kebijakan tersebut dapat mengganggu kepentingan orang banyak, terutama masyarakat Lambu yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai seorang petani. Serta adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat terkait penggunaan lahan. Selain itu juga, konflik tersebut mengalami eskalasi konflik yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi, kurang netralnya pemerintah maupun stekholder lainnya, komunikasi politik yang macet dan juga tidak berjalan dengan baik, serta penanganan konflik yang lambat dari pihak pemerintah. Pemerintah maupun seperti negosiasi, konsultasi, mediasi, dan terakhir arbitrase.

Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah mempunyai persamaan tentang konflik perebutan lahan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu juga mempunyai persamaan mengenai faktor penyebab serta upaya penyelesaian konflik tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian inipun sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berdasarkan kepada teknik pengumpulan data mulai observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Persamaan metode penelitian juga terdapat pada teknik pengambilan sampel purposive sampling.

2. Penelitian dari Febriana Muryanto (Skripsi, 2011), dari jurusan Pendidikan Sosiologi UNY. Mengenai “Faktor Penyebab Konflik Slemania dan Brajamusti dalam Persepakbolaan Didaerah Yogyakarta”. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab konflik itu muncul, bentuk-bentuk konflik serta dampak dari konflik tersebut terhadap suporter baik dari kelompok slemania ataupun dari kelompok brajamusti.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik antara kedua suporter itu terjadi sejak tahun 2001. Faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut; 1. Provokator dalam suporter, karena ada banyaknya anggota dari kelompok slemania dan juga brajamusti, berdampak kepada sulitnya mengontrol apa yang dilakukan setiap individu. Selain itu juga tindakan represif aparat keamanan juga menjadi salah satu faktor penyebab didalamnya. 2. Strata tim, kedua suporter ini merupakan suporter resmi dari PSS dan juga PSIM. Konflik diantara mereka mempunyai hubungan dengan naik dan turunnya strata tim yang mereka dukung. Hal inilah yang mengakibatkan animal power dari suporter muncul dan apabila hasil yang diharapkan itu tidak sesuai suporter maka frustrasi dan kekecewaan menghapiri suporter tersebut. 3. Derby (dua atau lebih tim dari satu daerah yang sama), Slemania dan Brajamusti mempunyai kedudukan yang berdekatan, hal ini

menyebabkan pertemuan kedua kelompok suporter besar ini secara fisik akan sering sekali berjumpa. 4) Kinerja dari perangkat pertandingan. Bentuk konfliknya anatara lain lagu-lagu rasis, ancaman-ancaman, serta bentrok fisik. Dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut adalah adanya luka fisik, fobia, finansial, tumbuhnya solidaritas kelompok dan juga akomodasi.

Kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang konflik yang terjadi antara dua pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian inipun sama-sama menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data mulai observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan dalam penelitian ini, peneliti fokus pada faktor-faktor mengapa konflik itu bisa terjadi dan bentuk-bentuk konflik yang terjadi. Subjek yang diteliti adalah kelompok suporter sepakbola. Sedangkan peneliti memfokuskan pada apa saja dampak yang terjadi akibat dari konflik ini dan juga bagaimana penyelesaiannya, subjek yang diteliti adalah masyarakat dan pemerintah daerahnya.

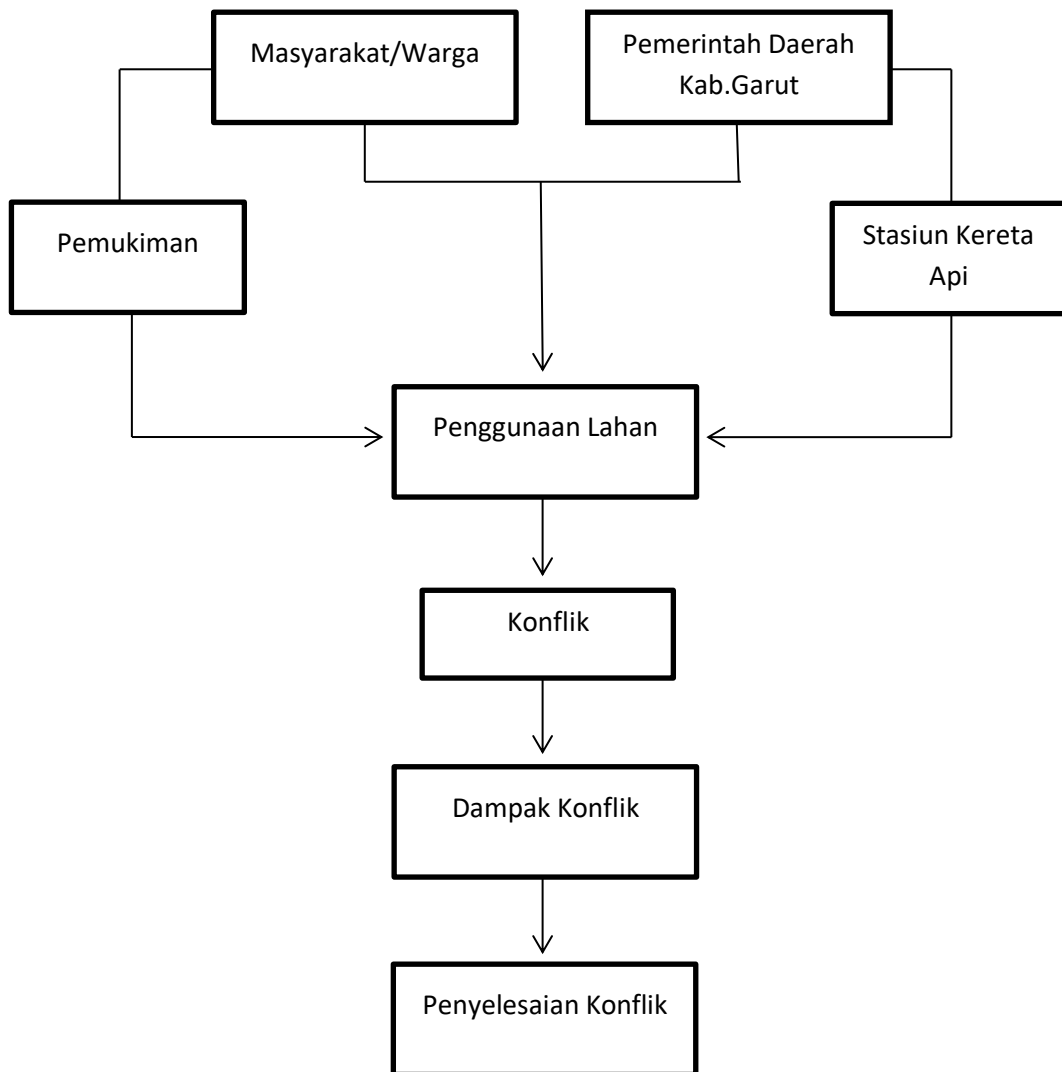
2.4 Kerangka pemikiran

Masyarakat/warga merupakan sekumpulan individu yang hidup didalam suatu wilayah tertentu dengan waktu yang lama serta memiliki nilai dan norma didalamnya. Lahan yang menjadi konflik dipergunakan oleh sebagian warga untuk dijadikan tempat tinggal, berbeda dengan

pemerintah garut yang akan mempergunakannya sebagai stasiun sekaligus jalur rel kereta api.

Perbedaan penggunaan lahan tersebut, menimbulkan konflik antara masyarakat setempat yang terkena dampak dengan pemerintah kabupaten Garut. Konflik lahir dari interaksi antarindividu maupun kelompok dalam berbagai bentuk aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Konflik yang terjadi ini muncul karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti perbedaan kepentingan dalam penggunaannya. Konflik yang terjadi menyebabkan dampak bagi masyarakat, baik itu secara sosial maupun ekonomi yang dialami oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. terjadinya suatu konflik dapat memunculkan cara untuk penyelesaian masalah tersebut agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan dapat terselesaikan sehingga tercapai suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak.



Gambar 1: Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara utuh, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dengan demikian peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena terdapat beberapa kesamaan dari yang telah dijelaskan yaitu dengan lebih memfokuskan kepada pemahaman yang dirasakan oleh subjek peneliti yang meliputi perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Oleh karena itu peneliti akan mendapatkan gambaran informasi atau data secara mendalam dan menyeluruh mengenai penyebab terjadinya konflik lahan ini

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Stasiun Garut yang terletak di jl.Baank, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Garut. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena ingin meneliti tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik ini, dampak apa yang terjadi akibat konflik dan bagaimana cara penyelesaian dari konflik tersebut. Masalah ini sudah berulang kali dibicarakan dengan pihak-pihak yang terkait namun masih belum menemukan titik terang diantara kedua belah pihak.

2. Waktu Penelitian

Penelitian mengenai konflik pembangunan stasiun kereta api antara pemerintah daerah garut dan masyarakat ini dilaksanakan selama 4 bulan.

3. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah masyarakat garut yang terkena dampak pembangunan stasiun terutama masyarakat di Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota. Serta Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Selain itu, Sasaran penelitian ini adalah mengenai tentang apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, dampak apa saja yang diakibatkan dengan adanya konflik ini, dan

bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik pembangunan stasiun kereta api garut ini.

4. Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa konflik pembangun stasiun kereta api antara Pemda Garut dan Masyarakat ini dapat terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya dengan menggunakan teori manajemen konflik.

5. Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan juga selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan yang lain-lainnya. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari objek yang akan diteliti. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu mengenai konflik lahan yang terjadi antara pemda dan warga setempat atas pembangunan stasiun kereta api dengan melakukan tanya jawab. Sedangkan data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung seperti dari jurnal-jurnal cetak maupun jurnal-jurnal elektronik, karya-karya ilmiah seperti skripsi atau tesis dan buku yang berkaitan dengan konflik.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian ialah mendapatkan data. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data, maka peneliti akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang akan ditetapkan. Penelitian ini menggunakan sumber data secara tertulis dan lisan, sehingga dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan cara utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami oleh subjek penelitian. Dan apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman umum, yang dimana peneliti dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum, dengan mencantumkan topik yang ingin diteliti. Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian dilakukan secara informal, interaktif (percakapan), dan melalui pertanyaan dan jawaban yang terbuka.

Walaupun pada awalnya peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak kaku mengikuti daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Wawancara mengalir sesuai dengan respon atau jawaban yang dikeluarkan oleh si subjek penelitian. Hal yang terpenting adalah peneliti dapat menggali informasi semua data yang dibutuhkan.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah proses pengambilan data dalam sebuah penelitian atau pengamatan melihat situasi penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengamati dari dekat dalam upaya mencari dan menggali data melalui pengamatan secara langsung dan mendalam terhadap obyek diteliti. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang sangat spesifik, dimana observasi ini tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga pada objek alam yang lain. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan proses pelaksanaan pengumpulan data observasi langsung. Dimana peneliti terlibat secara langsung dengan kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Adapun hal-hal yang peneliti amati adalah:

- Memperhatikan ruang dan waktu

- Memperhatikan objek dan subjek
- Mengamati kegiatan
- Waktu dan tujuan dari sebuah kegiatan

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Sedangkan menurut Lexy J.Moleong dalam Paizaludin dan Ermalinda, dokumentasi adalah dokumen yang digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Data yang diperoleh dari dokumen ini bisa digunakan untuk melengkapi atau memperkuat data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber.

7. Teknik Penetapan Informan

Teknik penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Peneliti memilih informan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Mereka dipilih karena peneliti menganggap kredibel untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian.

Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah warga setempat yang menjadi korban pengusuran akibat pembangunan stasiun kereta api dan pihak dari pemerintah daerah kabupaten Garut.

3.2 Metode Analisis data

1. Metode Analisis Data

Didalam sebuah penelitian yang bersifat kualitatif khususnya dalam pendekatan fenomenologi, data yang didapat di peroleh dari berbagai sumber dengan penggunaan pengumpulan data yang bervariasi juga, serta dengan melihat realitas lapangan yang terjadi sampai mencapai

pada titik maksimal yang sering dinamakan dengan titik jenuh. Setelah rangkaian data terkumpul, tahap selanjutnya dilakukanlah analisis data dengan prosedur dan juga teknis pengolahan dengan teknik analisis data interaktif yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Data yang sudah didapat dari observasi, wawancara, dan juga dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan. Kemudian, catatan lapangan tersebut dikumpulkan dan kemudian diambil bagian bagian yang dianggap relevan dengan inti permasalahan.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang sudah diperoleh di lapangan ditulis kedalam bentuk laporan atau uraian yang rinci, kemudian disederhanakan dan diokuskan pada hal yang penting yang dapat dikategorikan yang sesuai dengan fokus penelitian. Dilapangan data yang telah didapat sangat banyak sehingga perlu diteliti dan dirincikan sesuai dengan fokus penelitian yaitu mengenai konflik perebutan lahan antara pemda garut dan masyarakat setempat. Dalam mereduksi data, peneliti melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data untuk memperpendek, mempertegas, membuat fokus dan akhirnya membuang data yang tidak diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung dan merupakan bagian dari analisis.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

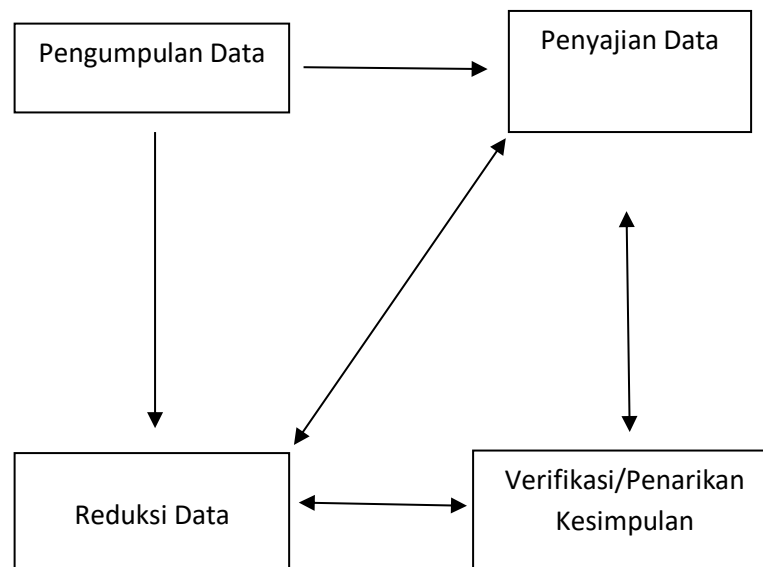
Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Informasi ini juga

termasuk kedalam matrik, tabel, skema dan juga jaringan kerja yang berkaitan dengan kegiatan. Dengan penyajian data peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dan dapat mengerjakan sesuatu pada analisis data ataupun langkah-langkah lain berdasarkan penelitian tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan (Conclsions Drawing/Verification)

Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan pokok-pokok dan makna dari sajian yang telah terorganisir dalam wujud pernyataan yang singkat dan jelas tetapi mengandung pengertian yang bermakna. Peneliti berusaha mencari makna dari data dan kemudian membuat kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan, peneliti juga harus mencari hubungan, pola persamaan dan sebagainya antar detail untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Dalam proses penyimpulan data merupakan suatu proses yang membutuhkan suatu pertimbangan yang benar-benar dipertanggungjawabkan.

Secara sederhana proses analisis interaktif dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2: Model Analisis Data Interaktif

Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan yang dilakukan. Pertama, pengolahan data diawali dengan melakukan penelitian terlebih dahulu hingga tersusunnya usulan penelitian. Kedua, tahap dimana pengolahan data lebih mendalam dilakukan dengan cara wawancara dan juga pengumpulan berbagai informasi yang ada dilokasi penelitian. Ketiga, selanjutnya dilakukannya pemeriksaan keabsahan data hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang telah dijadikan informan penelitian. Keempat, tahap akhir ini adalah analisis data dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan dengan pendekatan analisis triangulasi.

2. Validasi data

Validasi data pada penelitian ini adalah sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data selain itu juga digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah. Pada penelitian ini menggunakan teknik validasi triangulasi data, yang dipahami sebagai suatu pengecekan data. Terdapat triangulasi data sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan juga mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan sumber dari hasil informan dengan menggunakan metode wawancara kepada informan yang lainnya.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik merupakan teknik pengumpulan data yang sejenis dan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Untuk pengumpulan data tersebut peneliti melakukan teknik wawancara dan observasi yang kemudian hasilnya dibandingkan.

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan observasi yang ditindaklanjuti dengan melakukan wawancara kepada informan yang dalam hal ini adalah warga setempat yang terkena dampak pembangunan stasiun kereta api Garut dan juga pemerintah

daerah kabupaten Garut. Peneliti kemudian melakukan perbandingan informasi dari berbagai sumber agar tidak dibohongi. pencarian informasi dihentikan ketika sudah tidak ada lagi variasi informasi dan informasi dirasakan cukup untuk mewakili permasalahan yang diteliti. Peneliti kemudian melakukan dokumentasi dan mengumpulkan data atau dokumen lain yang terkait untuk melakukan perbandingan terhadap berbagai informasi yang didapatkan sehingga data yang dihasilkan menjadi akurat. Data wawancara dengan informan akan dibandingkan dengan data observasi di lapangan tempat kejadian dan dokumen pada saat terjadinya konflik.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Garut

Kabupaten Garut, adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Tarogong Kidul. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sumedang di utara, Kabupaten Tasikmalaya di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung di barat.

Sebagian besar wilayah kabupaten ini adalah pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa dataran rendah yang sempit. Di antara gunung-gunung di Garut adalah: Gunung Papandayan (2.262 m) dan Gunung Guntur (2.249 m), keduanya terletak di perbatasan dengan Kabupaten Bandung, serta Gunung Cikuray (2.821 m) di selatan kota Garut. Kabupaten Garut terletak di Provinsi Jawa Barat bagian Tenggara pada koordinat 6°56'49 – 7 °45'00 Lintang Selatan dan 107°25'8 – 108°7'30 Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administratif sebesar 306.519 Ha (3.065,19 km²) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang

Selatan Samudera Hindia

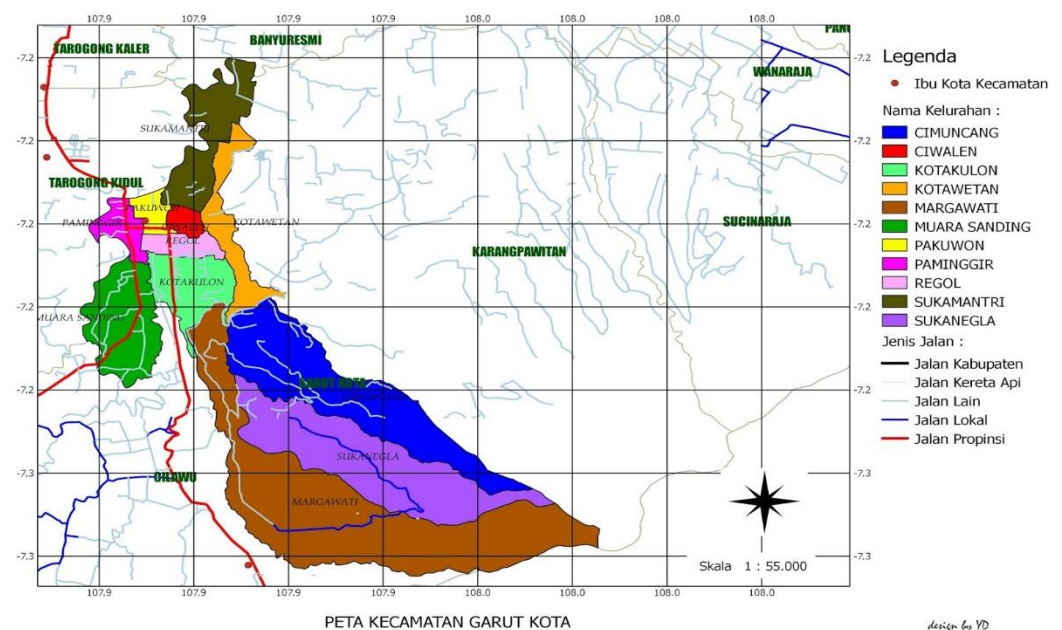
Barat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur

Timur Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Garut yang secara geografis berdekatan dengan Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, merupakan daerah penyangga dan hinterland bagi pengembangan wilayah Bandung Raya. Oleh karena itu, Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok kebutuhan warga Kota dan Kabupaten Bandung, sekaligus berperan di dalam pengendalian keseimbangan lingkungan.

B. Deskripsi Wilayah Desa Pakuwon

Penelitian ini dilakukan di Desa Pakuwon. Dimana Desa Pakuwon merupakan salah satu desa di Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut yang terletak di daerah tengah kota. Batas wilayah Desa Pakuwon sebelah utara adalah Kecamatan Tarogong Kidul, sebelah selatan adalah Desa regol, sebelah timur adalah Desa Ciwalen, Desa Sukamenteri, dan sebelah barat adalah Desa Paminggir.



Gambar 3 ; Peta Kecamatan Garut Kota



Gambar 4 ; Peta Desa pakuwon

C. Karakteristik Demografi

a. Komposisi penduduk Desa Pakuwon Berdasarkan jenis Kelamin

Jumlah secara keseluruhan penduduk Desa Pakuwon adalah berjumlah 7633 orang yang terdiri dari laki-laki berjumlah 3822 orang dan sisanya berjumlah 3801 orang perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 1420. Di Desa Pakuwon jumlah perempuan lebih sedikit dari pada jumlah penduduk laki-laki akan tetapi perbandingan antara keduanya hampir seimbang.

b. Komposisi Penduduk Desa Pakuwon Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi penduduk Desa Pakuwon menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tamat SD / Sederajat	844
2.	Tamat SMP / Sederajat	662
3.	Tamat SMA / Sederajat	1176
4.	Tamat D-1 / Sederajat	107
5.	Tamat D-2 / Sederajat	73
6.	Tamat D-3 / Sederajat	67
7.	Tamat S1 / Sederajat	293
8.	Tamat S2 / Sederajat	80
9.	Tamat S3 / Sederajat	9
10.	SLB A	12
11.	SLB B	1
12.	SLB C	4
Jumlah		3328

Tabel 1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Dari tabel 1 diatas, diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Pakuwon sebagian besar adalah Sekolah Menengah Atas / SMA, kemudian Sekolah Dasar / SD. Tingkat pendidikan yang rendah disebabkan oleh keterbatasan biaya dan mahalanya biaya pendidikan di Indonesia. Hal ini menyebabkan masyarakat Desa Pakuwon lebih memilih tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk bekerja.

Tingkat pendidikan yang rendah juga mengakibatkan masyarakat Desa Pakuwon memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan dan lebih memilih bekerja sebagai buruh. Hal inilah yang menyebabkan mereka berkonflik dengan Pemda dikarenakan tempat tinggal satu-satunya akan digusur dan bingung harus mencari tempat tinggal baru dengan kondisi ekonomi yang sulit.

c. Komposisi Penduduk Desa Pakuwon Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, baik sebagai pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan. Komposisi penduduk Desa Pakuwon berdasarkan mata pencaharian dapat digolongkan seperti tabel dibawah ini.

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Buruh Migran	150 Orang
2.	Pegawai Negri Sipil	67 Orang
3.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	79 Orang
4.	Pedagang Keliling	81 Orang
5.	Pembantu Rumah Tangga	53 Orang
6.	TNI / Polri	112 Orang
7.	Pengusaha Kecil dan Menengah	105 Orang
8.	Karyawan Perusahaan Swasta	360 Orang
9.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	104 Orang

10.	Wiraswasta	106 Orang
11.	Nelayan	22 Orang
12.	Dosen Swasta	10 Orang
13.	Arsitektur	3 Orang
14.	Pengusaha Besar	24 Orang
15.	Lain-Lain	347 Orang
Jumlah Total		1.623 Orang

Tabel 2 Komposisi Penduduk Desa Pakuwon Berdasarkan Mata Pencarian

Tabel 2 menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Pakuwon bekerja dibawah kata cukup bahkan masih banyak yang belum mempunyai pekerjaan. Hal ini yang menyebabkan masyarakat yang terkena gusuran memilih untuk mempertahankan tempat tinggalnya yang telah ditinggalinya sejak lama dan enggan untuk berpindah atau mencari tempat tinggal baru.

4.2 Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Konflik antara Pemda Garut dan Warga setempat

Menurut Soejono Soekarno konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan. Pada konteks konflik pembangunan stasiun yang terjadi di Kabupaten Garut

antara Pemerintah Daerah dan juga masyarakat setempat, berdasarkan hasil temuan terdapat beberapa penyebab terjadinya konflik, seperti.

A. Pembongkaran Tidak Mempertimbangkan Opini Masyarakat Setempat

Sebanyak kurang lebih 1.077 bangunan permanen dan juga semi permanen jalur kereta Cibatug-Garut dibongkar. Pembongkaran ini sangat disayangkan oleh masyarakat yang terdampak, karena waktu yang diberikan untuk pindah dirasa sangat singkat dan tidak memikirkan masyarakat kecil yang harus mencari tempat tinggal baru.

Mayoritas masyarakat menginginkan pemindahan dan pembongkaran dilaksanakan secepat-cepatnya pasca idul fitri agar masyarakat mempunyai waktu untuk mencari tempat tinggal dan memindahkan barang-barang yang berada di tempat tinggal lama ketempat tinggal yang baru. Tapi, pada pelaksanaanya pembongkaran tetap dilaksanakan oleh PT.KAI dengan Pemda setempat tetap melakukan pembongkaran sebelum hari raya idul fitri. Kebijakan inilah yang membuat msyarakat merasa geram, karena Pemerintah Daerah dirasa tidak memperhatikan warganya dengan tidak memberikan kelonggaran waktu yang diminta oleh masyarakat.

Selain itu, masyarakat merasa tidak diberikan hak untuk berbicara dan menyuarakan pendapatnya. Setidaknya, ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada Pemda Garut untuk diteruskan kepada PT.KAI selaku pemilik lahan tersebut. Pertama, mengenai kebijakan PT.KAI yang tidak memperbolehkan kereta ekonomi berhenti di stasiun cibatu yang dinilai

akan mematikan usaha rakyat kecil terutama pedagang asongan dan tukang ojek disekitar stasiun. Kedua, untuk adanya usaha pembuatan jalur baru agar masyarakat yang terdampak tidak terlalu banyak. Ketiga, apabila kebijakan tetap menggunakan jalur lama maka pemberian ganti rugi kepada masyarakat diharapkan layak dan tidak terlalu rendah.

Akan tetapi, usulan dan keinginan masyarakat ini tidak disambut dengan baik oleh Pemerintah Daerah, “Pemerintah Daerah tidak pernah mau mendengarkan pendapat kami (masyarakat), mereka hanya mementingkan kepentingannya sendiri bahkan setelah beberapa kali kami melakukan demo” ujar Rifgani atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Gani. Masyarakat yang terkena dampak ini setidaknya pernah melakukan beberapa kali demonstrasi yang dilakukan di depan kantor Bupati dan DPRD Garut dan juga di Stasiun Cibatuh.

B. Perbedaan Kepentingan penggunaan Lahan antara Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Stasiun Garut dan jalur kereta api yang telah dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat setempat yang menduduki lahan tersebut, kemudian dihadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Garut akan membangun dan mengfungsikan kembali jalur kereta api yang telah dialih fungsikan oleh masyarakat menjadi tempat tinggal. Beberapa tokoh masyarakat dan warga setempat menyayangkan jika kebijakan itu tetap dilaksanakan maka akan banyak masyarakat yang akan terkena dampak dari kebijakan tersebut. Seperti, tidak mempunyai

lagi tempat tinggal lagi terlebih mayoritas yang menduduki lahan tersebut adalah masyarakat yang kurang mampu yang hanya mengandalkan lahan tersebut untuk tempat tinggal.

Pembangunan stasiun ini dalam pandangan masyarakat hanya memberikan dampak baik kepada sebagian masyarakat, sementara apabila kebijakan ini dibatalkan atau dialihkan maka akan berdampak lebih luas terutama kepada masyarakat yang kurang mampu. “Sebenarnya saya tinggal disini sudah dari tahun 1990-an, tanah ini diminati oleh masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal, Karena memang letaknya yang tidak jauh dari kota dan juga letak tanah yang strategis. Pemerintah membangun kembali stasiun ini tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu pada masyarakat, sehingga membuat warga yang terkena dampak sangat kecewa dan marah karena merasa diacuhkan oleh pemerintah daerah tanpa memikirkan bagaimana nantinya warga yang kurang mampu untuk tinggal”.

Dengan adanya perbedaan mengenai kepentingan penggunaan lahan antara warga dan juga pemerintah daerah maka timbulah konflik kepentingan antara warga dan Pemda mengenai penggunaan lahan ini. Kurang adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat menyebabkan permasalahan pemanfaatan lahan ini menjadi tidak menemukan titik terang.

Peneliti mendapatkan hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara dengan bapak Lisin selaku tokoh masyarakat yang ikut terkena

dampak dari pembangunan stasiun ini. “di daerah ini tentu ada berbagai karakter, tentunya ini membuat setiap orang memiliki pandangan yang baik menurutnya masing-masing, jadi karena perbedaan pendapat menyebabkan konflik pemanfaatan tanah menjadi berlarut-larut. Kami sebelum mengambil keputusan ini, kita melakukan rapat dengan perwakilan warga dan beberapa tokoh disini, jadi kita rapat dulu, barulah hasil rapat keluar. Mencari solusi bersama dalam menangani masalah yang ada disini. Akan tetapi kami tidak disambut baik oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan pendapat warga, kami juga melakukan beberapa kali demo yang hasilnya tetap saja nihil”.

Selain itu peneliti mendapatkan hasil penelitian yang didapat dari wawancara dengan bapak Gani selaku tokoh masyarakat juga di daerah yang terkena dampak itu, sebagai berikut. “intinya ada kepentingan pribadi, mereka hanya mau mencari yang menurut mereka untung saja. Kami tidak tau untuk apa ada pembangunan itu, yang jelas itu pasti untuk kepentingan pribadinya, selama inikan kami menduduki tanah ini dan sebagian telah membangun rumah ditanah ini. Mengapa tidak dari dulu dibangun atau dilarang ditempatinya. Kenapa baru sekarang?”

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan diatas menjelaskan bahwasannya masyarakat tidak mengetahui mengapa stasiun ini akan kembali digunakan lagi setelah sekian lama. Disini peneliti melihat bahwa kurang adanya edukasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah

daerah agar situasi masyarakat yang sedang marah karena tempat tinggalnya terancam dapat diredam dan tidak menjadi konflik yang berkepanjangan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan diatas menjelaskan bahwasannya keinginan warga yang terkena dampak dari kebijakan ini adalah bentuk perhatian Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya. Yaitu dengan mendengarkan aspirasi warga dan juga memerhatikan nasib masyarakat yang kurang mampu, karena kehilangan tempat tinggal mereka. Selain itu harapan masyarakat adalah adanya ganti rugi kepada mereka yang tempat tinggalnya digusur.

4.3 Upaya untuk Menyelesaikan Konflik antara Pemda Garut dan Warga Setempat

Upaya penyelesaian konflik dalam pembangunan stasiun kereta api antara pemerintah daerah dan masyarakat selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan yaitu oleh pemerintah daerah, pemerintah desa/perangkat desa, organisasi masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Upaya yang dilakukanpun bermacam-macam seperti contohnya:

A. Membuka Dialog antara Pemerintah daerah dengan Warga Setempat

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini adalah dengan berdialog antara warga dan pemda. Pada akhirnya, pemda mendengarkan dan menuruti beberapa usulan yang diberikan oleh warga yang terkena dampak seperti pengupayaan membuat jalur rel baru. Ini di sampaikan oleh Wakil Bupati Garut Helmi Budiman. “usulan rel baru itu untuk menghindari

konflik dari warga yang menolak rencana tersebut. Saya usulkan itu misalnya di daerah yang sudah padat dibuat jalur baru” kata Helmi Budiman di pendopo Kabupaten Garut.

Selain itu, diharapkan pembangunan stasiun ini diberitakan secara luas agar masyarakat dapat mengetahui dan lebih memahami tujuan Pemerintah membuat kebijakan pembangunan stasiun kereta api ini agar tidak adanya kesalah pahaman antara kedua belah pihak.

B. Pemberian Ganti Rugi Kepada Warga yang Terkena Dampak

Pengaktifan kembali jalur kereta api ini mendapatkan penolakan dari warga yang tinggal dilahan tersebut. Mengenai hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menyatakan akan memberikan kompensasi/ganti rugi untuk warga yang terkena dampak pembangunan stasiun kereta api di Kabupaten Garut. Pemberian ganti rugi ini sebesar Rp250.000 untuk bangunan permanen dan Rp200.000 untuk semi permanen permeternya. Kebijakan ini disesuaikan dengan anggaran yang dikhususkan untuk pemberian ganti rugi kepada setiap warga yang terkena dampak.

4.4 Pokok Temuan Penelitian

Pokok-pokok temuan dalam penelitian mengenai konflik pembangunan stasiun kereta api garut antara pemerintah daerah kabupaten garut dan masyarakat setempat adalah sebagai berikut,

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik perebutan lahan antara pemerintah daaerah dan masyarakat setempat berupa

faktor adanya sebuah perbedaan kepentingan dalam penggunaan lahan tersebut.

Faktor utama pemicu terjadinya konflik perebutan lahan pemerintah daerah dan masyarakat setempat ini adalah adanya kepentingan yang berbeda antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat yang telah menempati lahan tersebut dari puluhan tahun yang lalu. Masyarakat tidak mau untuk berpindah dari wilayah tersebut karena sebagian rumah disana sudah menjadi tempat tinggal satu-satunya yang mereka miliki dan tempati sejak lama, upaya untuk berdialog antara kedua belah pihakpun selalu dirasa tidak menemui titik terang bahkan terkadang dirasa sulit untuk bertemu secara langsung untuk berdiskusi dan menyuarakan pendapat dari masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan ini.

2. Konflik yang terjadi ini adalah buah dari buruknya komunikasi yang dilakukan antara pemerintah daerah kabupaten Garut dan masyarakat setempat.

Konflik yang terjadi dalam perebutan lahan antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat ini sebetulnya sudah merupakan konflik terbuka. Konflik tersebut akan berakar semakin dalam dan nyata apabila dibiarkan tanpa penanganan yang bijak, sehingga diperlukannya berbagai tindakan untuk menyelesaikannya seperti perlu diperbaikinya komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakatnya. Sebagai yang mempunyai kekuasaan dan kewajiban

untuk mensejahterakan warganya, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut seharusnya bisa menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakatnya supaya konflik ini dapat diselesaikan secepatnya dan apa yang ingin dicapai atau tujuan pemerintah membuat sebuah kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakatnya sendiri, yang pada akhirnya adanya kerja sama / sinergi yang baik antara penguasa dan rakyatnya.

3. Solusi atau upaya dalam menangani konflik perebutan lahan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan masyarakatnya adalah sebagai berikut;

- a. Dari Pemerintah Daerah

Solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam konflik ini adalah adanya pemberian ganti rugi yang dihitung permeternya dan dibedakan antara bangunan yang permanen dan semi permanen. Selain itu, berupaya mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk dapat berdialog agar menemui titik terang mengenai persoalan ini dan memahami keinginan atau aspirasi masyarakat.

- b. Dari Masyarakat

Solusi yang ditawarkan oleh masyarakat sudah berulang kali dilakukan. Yang pada akhirnya masyarakat memilih jalan terakhir dengan upaya berdemonstrasi agar pemerintah membuka ruang opini kepada masyarakat yang terkena dampak

dari kebijakannya. Selanjutnya, upaya untuk memperlakukan masyarakat dengan semestinya dan tidak menggunakan kekerasan apabila melakukan penggusuran dan memberikan toleransi waktu yang cukup untuk masyarakat apabila memang masyarakat harus keluar dari lahan yang menjadi konflik tersebut.

4. Solidaritas atau persaudaraan masyarakat Desa Pakuwon semakin kuat setelah adanya konflik ini.
5. Kondisi sosial warga Desa Pakuwon setelah menemui solusi dari konflik ini semakin kondusif dan maju.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik agraria yang sedang terjadi di Indonesia merupakan konflik yang sering terjadi ditengah masyarakat Indonesia. Adanya konflik tersebut merupakan implikasi dari tidak adanya UU yang mengatur mengenai pertanahan dan juga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah mengenai program-program yang akan dilaksanakan. Permasalahan pembangunan stasiun kereta api di Garut ini terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda-beda antara kedua belah pihak. Tidak hanya itu, masalah ini timbul juga karena adanya kesalah pahaman antara kedaunya.

Terjadinya konflik mengakibatkan dampak bagi masyarakat, baik itu berdampak positif maupun negatif. Dampak negatif yang pertama adalah adanya korban harta, fisik, dan juga mental baik dari pihak pemerintah daerah maupun masyarakat. Selain itu juga maka berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa proses terjadinya konflik perebutan lahan di Kabupaten Garut antara Pemerintah Daerah dan Warga setempat sebagai berikut:

1. Faktor penyebab munculnya konflik di Kabupaten Garut, diantaranya: Pertama, pembongkaran pemukiman warga tidak mempertimbangkan opini / suara masyarakat setempat terlebih dahulu. Sehingga menimbulkan prasangka tidak pedulinya

2. Pemerintah daerah kepada warga yang terkena dampak pembangunan stasiun kereta api. Kedua, Perbedaan kepentingan penggunaan lahan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dimana masyarakat menginginkan lahan tersebut tetap menjadi pemukiman, sedangkan pemerintah daerah menginginkan lahan itu diaktifkan kembali menjadi stasiun kereta api demi upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Garut.
3. Proses penyelesaian konflik lahan ini diantaranya: pertama, membuka dialog antara pemerintah daerah dengan warga setempat. Agar tidak ada kesalah pahaman diantara kedua belah pihak. Kedua, pemberian ganti rugi kepada warga yang terkena dampak dari pembangunan ini. Ini dilakukan demi menekan gesekan atau konflik yang berkepanjangan antara pemerintah daerah dengan warga Selain itu juga ini merupakan bentuk keberhasilan dari adanya dialog antara kedua belah pihak hingga terciptanya kesepakatan bersama dan menghindari konflik yang semakin memburu

Tidak hanya itu saja, dalam upaya penyelesaian konflik ini juga dapat dilakukan dengan cara kompromi atau negosiasi yaitu dengan cara masing-masing memberikan pandangannya dan menawarkan solusinya pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima atau Take and Give , dan saling bekerja sama dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini. Dari pemerintah juga harus mampu melakukan pendataan yang akurat dan langsung terhadap hak-hak kepemilikan

tanah dengan bekerja sama dengan badan-badan yang ada ditingkat daerah agar diharapkan permasalahan semacam ini tidak dapat terulang kembali di kemudian hari dan menjadi konflik yang berkepanjangan.

B. Saran-Saran

Konflik agraris yang terjadi di kabupaten garut antara masyarakat dan pemerintah daerah di Desa Pakuwon, Kecamatan Garut Kota sampai saat ini masih membekas di masyarakat garut. Upaya yang dilakukan dalam upaya penyelesaian konflik ini harus tepat, kedua belah pihak harus bisa duduk bersama untuk membahas bagaimana masalah ini bisa cepat selesai dan mencari kata sepakat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, dalam penyelesaian konflik yang terjadi ini juga dapat dilakukan dengan cara kompromi atau *Compromise* atau negosiasi supaya kedua belah pihak dapat memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan dan juga saling memberi dan menerima (*Take and Give*), saling mendukung satu sama lain dan saling bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Adapun beberapa saran dari peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah daerah terus menjaga masyarakat agar tidak terjadi konflik yang merugikan banyak orang bahkan menimbulkan korban baik jiwa, harta dan juga tenaga. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah tidak gegabah dalam mengambil kebijakan dan tidak anti dengan masukan ataupun kritikan masyarakat.

2. Pemerintah daerah harus terus menerus ikut andil dalam menciptakan suasana masyarakat yang kondusif dan aman. Selalu menjadi penengah dalam setiap konflik yang ada bukan justru ikut terseret dalam konflik tersebut.
3. Masyarakat seharusnya juga lebih tenang dalam menyelesaikan konflik lahan seperti ini dan lebih memahami mengenai hukum.
4. Kedua belah pihak sama-sama introspeksi diri agar konflik semacam ini tidak terulang kembali dimasa yang akan datang, dan menghindari korban yang lebih luas lagi.
5. Selain itu, peneliti menyarankan bagi penelitian selanjutnya lebih memfokuskan terhadap tahapan-tahapan penyelesaian permasalahan dan resolusi dari resolusi konflik. Kendati, tahapan-tahapan dalam menyelesaikan permasalahan memiliki peran penting untuk menemukan suatu keputusan dari permasalahan yang terjadi.

Supaya konflik semacam ini tidak timbul kembali dimasa yang akan datang penulis mengharapkan ada solusi yang nyata dan kongkrit dari pemerintah, salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan badan-badan pertanahan yang sudah ada, melaksanakan pembaruan agraria. Karena, pelaksana reforma agraria telah menjadi amanat dalam UUD 1945, UUPA No.5 Tahun 1960, Tap MPR. No.IX/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No 11/2005 tentang kovenan ekosok, pemerintah mendirikan sebuah lembaga khusus penyelesaian konflik agraria di negara ini. Selain itu, badan pertanahan

juga harus mampu mendata kembali kepemilikan tanah yang sudah lama, agar tidak adanya rasa kepemilikan yang diakui oleh beberapa pihak yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Affandi, Hakimul Ikhwan (2004). *Akar konflik sepanjang Zaman Elaborasi pemikiran Ibn Khaldun*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Ahmadi, Abu. (1991). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Syafiie, Inu Kencana Prof. DR. H. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Mandar Maju

Priyanto, Supriyo (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Semarang : Fasindo

Abdul Syani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara

Sumber Internet :

<https://katadata.co.id/berita/2019/01/03/selama-2018-konflik-agraria-paling-banyak-di-sektor-perkebunan> “Konflik Agraria Paling Banyak di Sektor Perkebunan”, pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 10:30

<https://bandung.kompas.com/read/2018/12/13/16531041/fakta-di-balik-reaktivasi-jalur-ka-cibatu-garut-ancam-jalan-kampung-hingga?page=all> “Fakta Dibalik Reaktivasi Jalur Ka Cibatu Ancam Jalan Kampung” pada tanggal 20 Agustus 2019 pukul 08:00 wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia “Pemerintahan Daerah di Indonesia”, pada tanggal 12 November 2019 pukul 19.59

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/> “Pengertian Pembangunan Menurut Para Ahli”, pada tanggal 12 November pukul 21.03

LAMPIRAN-LAMPIRAN**Lampiran I :****Daftar Informan**

No	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Ket
1.	Bapak Lisin	Tokoh Masyarakat	Aktif
2.	Bapak Rifgani FS	Tokoh Pemuda	Aktif

Lampiran II :**Dokumentasi**

Foto bersama informan dilokasi pembangunan stasiun kereta api



Foto Proses Penggusuran Rumah Warga



Kondisi proses penggusuran dan pemilik bangunan

Pedoman Wawancara

Berikut ini merupakan pedoman wawancara yang saya pakai dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pendapat bapak tentang kebijakan tentang pembangunan stasiun kereta api?
2. Apakah bapak merasa dirugikan dengan adanya pembangunan tersebut?
3. Apakah bapak tau soal konflik yang terjadi mengenai pembangunan stasiun kereta api?
4. Bagaimana awal mula terjadinya konflik tersebut?
5. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tersebut?
6. Bagaimana upaya masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik tersebut?
7. Apa yang bapak harapkan dari kebijakan pemerintah daerah mengenai pembangunan stasiun kereta api?